

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi pada negara tertentu dapat menjadi sebuah faktor yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut, misalnya krisis pada tahun 1998 dan tahun 2008. Krisis tahun 1998 merupakan krisis ekonomi regional. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia yaitu nilai Rupiah terdepresiasi dari Rp2.500,00/USD menjadi Rp10.000,00/USD. Kondisi tersebut mengakibatkan harga bahan baku impor untuk sektor industri relatif tinggi, sehingga dampak dari krisis terutama dirasakan oleh sektor industri manufaktur dan perkotaan (Hady, 2012: 33). Sedangkan krisis tahun 2008 merupakan krisis ekonomi global. Berdasarkan *Outlook* Ekonomi Indonesia 2009-2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2009), diketahui bahwa dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya gejolak di pasar modal dan pasar uang. Terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari tahun 2008 awal sebesar 2.627,3 menjadi 1.355,4 pada bulan Desember 2008, ada penurunan tajam volume perdagangan saham, dan disertai arus keluar kepemilikan saham oleh pihak asing. Gejolak tersebut menunjukkan kekuatan permintaan dunia yang menurun, mengakibatkan merosotnya harga berbagai komoditas ekspor, sehingga akhirnya berdampak pula terhadap kinerja seluruh sektor industri di Indonesia. Jadi, baik krisis ekonomi regional maupun krisis ekonomi global akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama sektor manufaktur.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam strateginya mengenai pengembangan umum pasar modal Indonesia, menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia rentan dengan adanya gejolak perekonomian yaitu akibat penerapan *Good Corporate Governance* yang masih lemah (Sutedi, 2011: 80). Berdasarkan penelitian mengenai skor peringkat *corporate governance* di Asia yang telah dilaksanakan oleh *Political and Economic Risk*

Consultancy (PERC) pada tahun 2000, posisi Indonesia yaitu tiga terbawah negara Asia dalam penerapan *corporate governance* (Sutedi, 2011: 65). Berikut adalah tabel skor peringkat *corporate governance* di Asia:

Tabel 1.1 Skor Peringkat *Corporate Governance* di Asia

| No. | Negara | Skor |
|-----|---------------|------|
| 1. | Singapura | 2,00 |
| 2. | Hongkong | 3,59 |
| 3. | Jepang | 4,00 |
| 4. | Filipina | 5,00 |
| 5. | Taiwan | 6,10 |
| 6. | Malaysia | 6,20 |
| 7. | Thailand | 6,67 |
| 8. | Cina | 8,22 |
| 9. | Indonesia | 8,29 |
| 10. | Korea Selatan | 8,83 |
| 11. | Vietnam | 8,89 |

Keterangan: makin tinggi skor, makin buruk *good governance*
Sumber: PERC, 2000

Upaya penguatan kerangka GCG dimulai sejak terjadinya krisis Asia tahun 1998. Pemerintah Indonesia menyusun Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) saat tahun 1999, yang melibatkan 30 orang dari sektor publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Kemudian KNKCG digantikan dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) saat tahun 2004, karena adanya pertimbangan untuk memperluas cakupan tata kelola di sektor publik (*public governance*). Pedoman Umum GCG telah dikeluarkan pertama kali pada tahun 1999, kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Namun demikian, penerapan pedoman tersebut bersifat sukarela serta tidak merupakan bagian dari ketentuan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (OJK, 2014).

Dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014, dinyatakan bahwa upaya untuk mendorong perusahaan dalam mempraktikkan GCG dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua aspek GCG dapat dijadikan peraturan, karena akan menjadi beban bagi emiten dan perusahaan publik. Kemampuan perusahaan dalam menerapkan regulasi berbeda-beda, tergantung dari sektor, industri,

dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, OJK merekomendasikan adanya pendekatan *comply or explain* yang membuat implementasi GCG pada emiten dan perusahaan publik menjadi lebih fleksibel. Dua komponen penting dalam pendekatan *comply or explain* yaitu yang pertama adalah tersedianya pedoman tata kelola khusus bagi emiten dan perusahaan publik, dan yang kedua adalah adanya peraturan yang mengharuskan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan kepatuhannya terhadap pedoman tata kelola yang dimaksud, bila tidak sanggup mematuhi maka harus dapat menjelaskan alasannya. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, pendekatan tersebut cukup kuat untuk memicu peningkatan implementasi tata kelola perusahaan secara fleksibel dan dapat membangun disiplin diri perusahaan secara sukarela.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah disesuaikan dengan adanya konsep GCG yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, dinilai sudah tidak memenuhi perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat diakibatkan oleh perkembangan yang begitu pesat pada era globalisasi terkait kondisi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Selain itu terkait pula dengan adanya permintaan masyarakat dalam hal pelayanan yang cepat, adanya kepastian hukum, dan permintaan untuk mengembangkan dunia usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) lebih komprehensif dalam mengakomodasi dan menjabarkan prinsip GCG dengan mengatur kesetaraan organ perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, serta dijelaskan pula peran dan tanggung jawab dari organ perusahaan dan elemen tata kelola perusahaan lainnya (OJK, 2014).

Upaya yang juga telah dilakukan untuk mendorong penerapan GCG di Indonesia yaitu dengan adanya pemberian insentif atau penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG (OJK, 2014). Contohnya yang pertama yaitu *Annual Report Award (ARA)* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002, yang merupakan penghargaan terhadap

laporan tahunan perusahaan Indonesia. Kedua, dengan adanya *Capital Market Awards* mulai tahun 2006 yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mendorong perusahaan tercatat dan perusahaan efek dalam menerapkan standar dan praktik-praktik bisnis yang baik serta berkelanjutan, yang meliputi praktik GCG. Ketiga, adanya *IICD Corporate Governance Award* mulai tahun 2009, yang didasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia, yang menggunakan instrumen penilaian berupa *CG Scorecard*. Keempat, *IICG Award – Most Trusted Award* pada tahun 2001, yang terfokus pada perusahaan terbuka, BUMN dan swasta, dan berdasarkan pada *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

Good Corporate Governance (GCG) yaitu sebuah struktur yang mengarahkan perusahaan agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya. Penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dinilai dapat membantu perusahaan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan diterapkannya GCG di setiap perusahaan diharapkan dapat mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional yang semakin meningkat, yang mampu menambah kepercayaan pasar dan akhirnya bisa mendorong arus investasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan konsep GCG tersebut tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip GCG yaitu yang pertama transparansi (*transparency*), kedua yaitu akuntabilitas (*accountability*), ketiga yaitu tanggung jawab (*responsibility*), keempat yaitu independensi (*independency*), serta kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (KNKG, 2006).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memiliki model *board structures* yaitu *two-tier board system* atau *two-board system*. Model tersebut menyatakan secara tegas adanya pemisahan keanggotaan dewan, yaitu Dewan Komisaris yang menjadi pengawas serta penasihat dan Dewan Direksi yang menjadi eksekutif korporasi (Rahadian, 2009). Dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan dan pengelolaan di dalam menjalankan perusahaan, diharapkan hal tersebut dapat menjadi dasar dari pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengawas dengan pihak pengelola. Konflik kepentingan tersebut dapat menimbulkan terjadinya biaya agensi. Biaya agensi yang mungkin muncul dapat berupa biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan perusahaan, biaya akibat risiko kerugian yang tinggi karena pilihan proyek yang berbeda dengan jika dilakukan oleh pihak pengawas atau pemegang saham, biaya akibat adanya kegiatan monitoring terhadap kinerja dan perilaku pengelola oleh pengawas (*monitoring cost*), ataupun biaya akibat dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan pengelola oleh pengawas (*bonding cost*) (Sutedi, 2011: 17).

Beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Wulandari (2006) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia. Mekanisme *corporate governance* internal dilihat dari jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan *Debt to Equity Ratio* (DER); mekanisme *corporate governance* eksternal dilihat dari kepemilikan institusional. Sedangkan kinerja dinilai dengan menggunakan Tobin's Q. Hasil dari penelitian tersebut yaitu hanya DER yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dewayanto (2010) melaksanakan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan nasional. Indikator mekanisme pemantauan kepemilikan saham perusahaan yaitu berupa kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan oleh pihak asing, serta kepemilikan oleh pemerintah; indikator mekanisme pemantauan pengendalian internal perusahaan berupa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, serta komisaris independen; indikator mekanisme pemantauan regulator berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR); indikator mekanisme pemantauan pengungkapan berupa auditor eksternal Big 4. Variabel-variabel independen tersebut didukung oleh variabel kontrol berupa ukuran bank. Sedangkan kinerja perbankan sebagai variabel dependen diukur dari *Return on Assets*. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif

signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan. Sedangkan CAR, auditor eksternal Big 4, dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Santoso (2010) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja dengan indikator struktur kepemilikan berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial; indikator struktur dewan berupa dewan komisaris dan dewan direksi; indikator dewan independen berupa komite audit. Sedangkan kinerja ditunjukkan melalui nilai Tobin's Q. Hasil dari penelitian tersebut yaitu struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan pada tingkat signifikansi 10%, dewan direksi berpengaruh positif signifikan pada tingkat signifikansi 1%, komite audit berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi 1%, dan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi 10%.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak dari pelaksanaan mekanisme *corporate governance* yang dipandang dari segi jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Sektor perusahaan yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan suatu perusahaan industri yang melakukan pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi, yang akhirnya didistribusikan oleh perusahaan. Bahan baku merupakan faktor penting bagi perusahaan manufaktur untuk dapat beroperasi, sedangkan harga dari bahan baku itu sendiri dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi perekonomian Indonesia. Dengan adanya penerapan konsep GCG yang kuat di setiap perusahaan, diharapkan kinerja perusahaan tersebut tidak mudah terpengaruh oleh gejolak perekonomian yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh indikator-indikator mekanisme pengendalian terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR”.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, perumusan masalah penelitiannya adalah apakah mekanisme *corporate governance* yang dilihat dari jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang dilihat dari jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan manufaktur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian yang terkait pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Bagi emiten, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik.
3. Bagi investor, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi, khususnya di sektor perusahaan manufaktur.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi tinjauan teori yang terkait dengan variabel-variabel penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka pikir, serta definisi operasional variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, perhitungan data variabel penelitian, serta uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang statistik deskriptif, pemilihan teknik estimasi regresi data panel, uji asumsi klasik, serta hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan serta saran dari hasil analisis data dan juga pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.